

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan .

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan kepada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional .

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro bersama-sama dengan para pejabat structural dan staf dinas Sos Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang memuat dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kerja. Agar pelaksanaan kegiatan terarah dan berkesinambungan dan memudahkan monitoring dan evaluasi maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program kerja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor .22);
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :104);
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125);

4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
7. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan RENSTRA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan Bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro selama 5 (lima) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA adalah :

1. Digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerja Dinas .
2. Pedoman dalam penyusunan Renja SOPD
3. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro.
4. Memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi kinerja dan pelayanan SOPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra ini dengan sistematika meliputi :

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu dilaksanakannya pembangunan di Bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro. Melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat di dayagunakan secara optimal,efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar kekuatan hukum atau acuan dalam pembentukan,penyelenggaraan, penyusunan dan pengendalian pada sektor tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro

1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan sektor tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro selama 5 (lima) tahun,serta bertujuan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan evaluasi kinerja dan pelayanan SOPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka dasar penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SOPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SOPD

Merupakan penjabaran tugas,fungsi dan bagaimana struktur organisasi suatu SOPD.

2.2 Sumber Daya SOPD

Merupakan jumlah pegawai dan fasilitas penunjang operasional SOPD

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD.

Gambaran seberapa jauh tingkat kinerja pelayanan yang di jalankan dalam satu Tahun Anggaran pada SOPD.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Gambaran kemampuan SOPD dalam memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang untuk menjadikan lebih baik.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD.

- Pemahaman tentang apa yang menjadi pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Menyelaraskan Visi, Misi SOPD dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.
 - 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/Kabupaten
Tentang bagaimana pelaksanaan renstra SOPD yang diselaraskan dengan renstra kementrian.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tidak ada keterkaitan khusus dengan rencana tata ruang wilayah, namun lebih dalam penanganan masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Apa yang harus dioptimalkan untuk dapat mengatasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**
- 4.1 Visi dan Misi SOPD
Gambaran visi dan misi SOPD.
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD
Apa yang hendak dicapai oleh SOPD dalam jangka menengah.
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh SOPD sebagai aktualisasi untuk mewujudkan visi dan misi SOPD.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SOPD.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SOPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Seberapa jauh kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN**

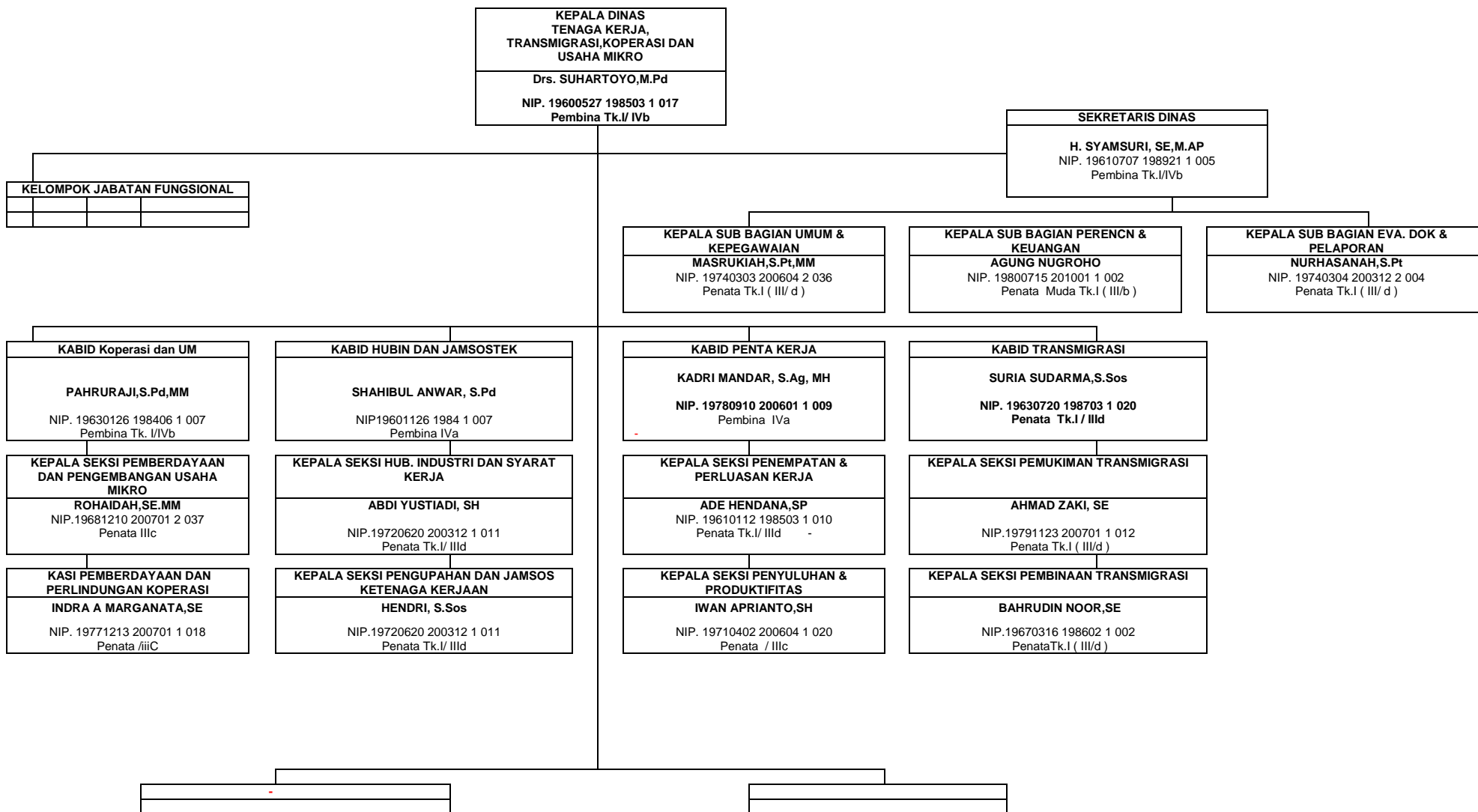
BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SOPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 23 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SOPD sebagai berikut :

- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - b. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan tenaga kerja , hubungan industrial
 - c. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan transmigrasi
 - d. Pemberian perijinan dan pelayanan umum
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai perda No.16 Tahun 2016
adalah seperti pada gambar 1 .



2.2 Sumber Daya SOPD

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal. Keadaan pegawai dan asset/modal pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 67 orang yang terdiri dari 57 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang tenaga PTT.

Berdasarkan eselon terdiri dari :

Pejabat eselon II : 1 orang

Pejabat eselon III : 5 orang

Pejabat eselon IV : 11 orang

Non eselon : 40 orang

Tenaga PTT : 10 orang

Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan kualifikasi pendidikan seperti dalam tabel di bawah ini:

NO	Uraian	S2	S1	D3	SMA
1	PNS	7 orang	35 orang	3 orang	12 orang
2	PTT Umum		3 orang		6 orang
3	PTT Khusus		1 orang		
	Jumlah	7 Orang	39 orang	3 orang	18 orang

2) Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu sejak pemekaran dari Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Asset/Modal Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu

No Urut	Nama Bidang/Barang	Jlm Barang	Ket
01	TANAH		
	- Tanah Bangunan Transito	1	
02	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-alat Besar		
	- Portable Generating	2	
	b. Alat-alat Angkutan		
	- Toyota Rush	1	
	- Toyota HILUX	1	
	- Sepeda Motor	23	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	➤ Mesin Gerinda Tangan	4	
	➤ Mesin Bor Tangan	4	
	➤ Butteray Charger	4	
	➤ Peralatan Las Lainnya	12	
	➤ Perkakas Standar Lainnya (kunci Shock	8	
	➤ Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	4	
	➤ Drel Ketok	8	
	➤ Multiteter &accesoire	8	
	d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Mesin Ketik Elektronik	5	
	- Mesin Absen (Time Recorder)	2	
	- Lemari Besi/Metal	18	
	- Papan Nama Instansi	1	
	- Papan Pengumuman	2	
	- Lemari Kayu	11	
	- Kursi Tamu	1	
	- Kursi Lipat	75	
	- Meja ½ Biro	55	
	- Alat Mebeler Lain (Kursi Keramas)	2	
	- Alat Mebeler Lain (Steam Rambut)	4	
	- Alat Mebeler Lain (Meja Rias)	8	

	- Alat Mebeler Lain (Hair Dryer)	8	
	- AC Unit	5	
	- Kipas Angin	8	
	- Kompor Gas	16	
	- Kompor Minyak	16	
	- Alat Dapur Lain (Oven Besar)	16	
	- Alat Dapur Lain (mixer)	16	
	- Tabung Gas	16	
	- Mesin Giling Bumbu	8	
	- Televisi	1	
	- UPS	4	
	- Camera Video	3	
	- Mesin Jahit	16	
	- seterika	4	
	- Alat Rumah Tangga Lain (Mesin Obras)	3	
	- Alat Rumah Tangga Lain (Mesin Pembuat Lubang Kancing)	4	
	- Alat Rumah Tangga Lain (Alat Pres Kancing)	4	
	- Penampung Air	3	
	- Alat Alas Barang	4	
	- PC Unit	7	
	- Laptop	13	
	- Printer	17	
	- Meja Kerja Pejabat Es.II	1	
	- Meja Kerja Pejabat Es.III	5	
	- Kursi Kerja Pejabat Es.II	1	
	- Kursi Kerja Pejabat Es.III	6	
	- Kursi Kerja Pejabat Es.IV	20	
	e. Alat-alat Studio dan Komunikasi		
	- Proyektor + Attachment	1	
	- Handy Talky (HT)	3	
03	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Bangunan Gedung		
	- Bangunan Transito	2	RB
	- Bangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	1	
04	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA		
	a. Buku dan perpustakaan		
	- Geografi dan Eksplorasi	3	

2.3. Kinerja Pelayanan SOPD

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat pencari kerja maupun pemberi pekerjaan, transmigran dan pelaku usaha mikro.

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan masing-masing bidang diantaranya :

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja fokus pada pelatihan, penempatan dan perluasan kerja.
2. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek fokus pelayanan pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, syarat kerja dan jamsostek.
3. Bidang Transmigrasi memfokuskan pelayanan pada pembinaan transmigran.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro agar dapat menunjang perekonomian masyarakat dan berdaya saing tinggi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten serta Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro maka Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan. Dalam hal melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya tentu saja ada tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Untuk itu perlu mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan. Berbagai faktor itu meliputi faktor internal yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta faktor eksternal yaitu (opportunities) dan ancaman (threats)

yang dapat dievaluasi dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunities dan Threats (SWOT) .

2.4.1. Tantangan

Dibidang ketenagakerjaan dengan ketidak stabilannya kondisi ekonomi saat ini, kondisi ketenagakerjaan lima tahun kedepan akan semakin kompleks. Pertama karena kedepan Indonesia segera memasuki masyarakat Ekonomi Asean atau AFTA/AEC (Asean Free Trade Area/ASEAN Economic Community). Dengan persaingan yang ketat. Kedua permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini belum terselesaikan dengan baik, diantaranya besarnya jumlah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, banyaknya penduduk bekerja dengan status pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga. Masih besarnya angkatan kerja yang berpendidikan maksimum SD, rendahnya keterampilan, produktivitas kerja dan perlindungan tenaga kerja. Kondisi ekonomi tersebut sangat besar dampaknya terhadap daerah-daerah diseluruh Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Bumbu yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada industri-industri perusahaan baik perusahaan pertambangan maupun perkebunan dan bidang usaha lainnya.

Tantangan yang dihadapi adalah dengan adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini ,sehingga membuat lesu pelaku usaha maka banyak sekali kasus PHK .Dengan begitu dampaknya tentu saja meningkatnya jumlah masyarakat miskin, karena yang tadinya punya pekerjaan dan penghasilan tetap menjadi tidak punya penghasilan. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah yang sangat kompleks

2.4.2 Peluang

Pemerintah Pusat dengan kabinet kerjanya telah menetapkan kebijakan pembangunan lengkap dengan target-target yang harus dicapai 5 tahun mendatang

sebagaimana tertuang dalam “NAWACITA”. Isi NAWACITA yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan adalah Nawacita ke 5 dan ke 6, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional. Dengan adanya Nawacita yang terdapat pada poin 5 dan 6 tersebut dan tujuan Nawacita ke 8 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus ,inklusif,dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang , dalam hal ini merupakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu berkewajiban menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut khususnya dibidang ketenagakerjaan dalam upaya untuk :

- a. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan menjaga konditivitas iklim ketenagakerjaan.
- b. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif.
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Hal tersebut dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja serta upaya-upaya menjaga harmonisasi hubungan pemerintah dengan pelaku usaha di Kabupaten Tanah Bumbu.

Nawacita 9 agenda prioritas kabinet Jokowi juga merupakan peluang bagi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya mengatasi kemiskinan karena pemerintah pusat sudah menetapkan tujuan Nawacita yang pertama yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun dan tujuan ke 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia.

BAB. III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra Provinsi, Kajian RTRW, maka berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SOPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SOPD
			INTERNAL	EKSTERNAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .	60 %	90 %	Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan	Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah	Belum seluruhnya para pelaku usaha taat terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
- Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	44,07 %	90 %			
- Besaran Pemeriksaan Perusahaan	46,61 %	90 %			
- Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	4,3 %	90 %			

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 ,Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penataan dan Pengelolaan Pelabuhan sebagai terminal Poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata .
2. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan .
4. Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal .
5. Menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan dan birokrasi yang baik ,efektif dan bersih.

Memperhatikan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tersebut Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menekankan pada Misi Kedua dan Keempat yaitu:

Misi Kedua : Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional .

Misi Keempat : Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean(MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

Sebagai bentuk tanggungjawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan wakil Bupati Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tanah Bumbu menyajikan factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SOPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil bupati tersebut dalam tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim utama serta Pusat Perdagangan, Industry, dan Pariwisata di Kalimantan selatan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi Strategis Daerah Menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Misi ke-2 dan ke-4

Ketenagakerjaan				
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. 3. Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Tripartit. 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 5. Survey Kebutuhan Hidup Layak. 	<p>Belum adanya tempat sidang mediasi sehingga sidang masih bergabung diruang Kabid.</p> <p>Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Masih sering terjadi salah persepsi dlm menentukan upah minimum.</p> <p>Belum semua perusahaan bisa termonitor.</p> <p>Data belum valid</p>	<p>Belum adanya mediator yang berlegitimasi.</p> <p>Kurangnya kesadaran perusahaan dalam mematuhi aturan ketenagakerjaan.</p> <p>Belum ada kesepakatan dalam nominal upah.</p> <p>Sarana dan prasarana kurang mendukung</p> <p>Data yang diberikan responden kadang tidak sesuai dengan harga sebenarnya.</p> <p>Belum adanya Balai Latihan Kerja</p>	<p>Agar PNS yang memenuhi syarat diikuti sertakan dlm program diklat.</p> <p>Sosialisasi dan pembinaan .</p> <p>Melakukan orientasi tugas ke daerah yang lebih maju.</p> <p>Memperkenalkan tim survey kepada responden/pedagang.</p> <p>Merencanakan kembali pembangunan BLK</p>
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan bagi para pencari kerja</p>		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro

Pada Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan maka Visi Misi Provinsi Kalimantan Selatan adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi dan Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang produktif ,berdaya saing, mandiri dan Sejahtera “ dengan sasaran jangka menengah adalah :

1. Pembinaan Kompetensi, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Pembinaan hubungan Industrial ,perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta kesejahteraan pekerja .
3. Pembangunan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan .
4. Memberdayakan Transmigrasi dan penduduk sekitarnya menuju masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah .
5. Pembinaan Koperasi mandiri yang kuat

Berdasarkan hal tersebut diatas ,maka factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka menengah K/L yaitu seperti pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Kalimantan Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SOPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ketenaga Kerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Belum adanya tempat sidang mediasi.	Belum adanya mediator yang terlegitimasi	Agar PNS yang memenuhi syarat diikutsertakan Diklat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SOPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Pemberdayaan dan pembinaan LKS Tripartit	Melakukan orientasi tugas ke daerah yang lebih maju	Melakukan orientasi tugas ke daerah yang lebih maju	Melakukan orientasi tugas ke daerah yang lebih maju
3.	Meningkatkan kapasitas masyarakat Transmigrasi yang produktif, sehat, terdidik dan kelembagaan yang berfungsi dikawasan transmigrasi	Kurangnya data informasi eks transmigrasi sehingga warga tidak mendapat informasi yang jelas	Data peta masih berbasis peta sketsa yang tidak memiliki koordinat	Mengempentarisir data peta-peta eks transmigrasi dan mengubah peta menjadi peta digital

Visi: - Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan UMKM yang tangguh serta berdaya saing				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro				
	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM (Koperasi Mikro Kecil Menengah)	Belum didukungnya sumber daya aparatur dengan sarana/ Prasarana yang memadai dalam melaksanakanTupoksi sebagai Pembina Koperasi dan Usaha Mikro	Sarana/Prasarana dan anggaran yang kecil untuk melaksanakan pembinaan	Sarana /Prasarana dan anggaran yang memadai/ mencukupi untuk pelaksanaan tupoksi pembinaan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di kemukakan diatas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Dalam hal wacana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk bidang

ketenagakerjaan tidaklah memiliki keterkaitan yang urgen, kecuali untuk bidang transmigrasi, dan Koperasi dan Usaha Mikro

Perlu dipahami bahwa kawasan transmigrasi pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya. Oleh karena itu manakala suatu daerah merencanakan wilayah transmigrasi baru tentu sebelumnya harus dilakukan berbagai penelitian hingga telaahan persoalan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan bidang strategis karena pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana kita ketahui tidak saja soal pembangunan fisik belaka tetapi juga soal pembangunan non fisik menyangkut sosial, ekonomi, budaya dll.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil bupati terpilih, sasaran jangka menengah pada renstra Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SOPD dan identifikasi dengan melakukan review kembali terhadap factor-faktor pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian, maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

Bidang Ketenagakerjaan :

Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah:

1. Tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian saat ini yang menyebabkan lesunya dunia usaha sehingga banyak kasus PHK, kurangnya lapangan kerja dan,keahlian (kompetensi) tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja ,dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah. Sedangkan dalam era Masyarakat ekonomi Asean (MEA) tenaga kerja dituntut mempunyai daya saing tinggi .
2. Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial (perselisihan hak dan kepentingan).
3. Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja,kesejahteraan pekerja,ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha .
4. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek (sekarang BPJS Ketenagakerjaan)
5. Masih tingginya pelanggaran norma kerja dan norma K3.
6. Minat penduduk lokal yang cenderung untuk memilih-milih jenis pekerjaan.

Bidang Ketransmigrasian :

Isu Strategis sebagai berikut :

1. Klaim lahan warga transmigrasi oleh pihak luar sehingga penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).
2. Tapal batas antara desa ex UPT dengan desa lama maupun tapal batas bersama desa ex UPT. Untuk ini perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi batas desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Bidang Penta Kerja

Isu Strategis sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Pelatihan belum mendukung
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan
3. Kebutuhan pangsa pasar tidak sesuai dengan keterampilan/ skill yang dimiliki Masyarakat
4. Seluruh perusahaan BUMN dan BUMD, Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Informasi Lowongan penempatan kerja kepada Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro
5. Seluruh Perusahaan / BUMN, BUMD dan Instansi Perintah wajib memprioritaskan penempatan tenaga kerja lokal (AKL) yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Menyelenggarakan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja (perusahaan).
7. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Isu Strategis sebagai berikut :

- 1 . Kemudahan perizinan untuk legalitas pelaku usaha mikro dan kecil
- 2 Fasilitasi akses permodalan ke perbankan bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- 3 Pengembangan produk unggulan KUMKM/ Branding Produk
- 4 Meningkatkan kelembagaan koperasi yang berkualitas
- 5 Pemberdayaan SDM kelembagaan Koperasi dan pelaku usaha mikro kecil/Intreneur di Desa dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

BAB. IV
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS TENAGA
KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

**4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Tanah Bumbu**

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan Berintelektual Tinggi “***.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu maka dengan ini menetapkan visi :

“ Wujudkan Masyarakat Terampil, Mandiri, Sejahtera Bersama “

Visi yang dimaksudkan :

1. Masyarakat Terampil dimaksudkan adalah masyarakat memiliki berbagai keterampilan melalui berbagai macam pelatihan sehingga memiliki kemampuan secara optimal dan mampu menjadi sumber daya manusia yang siap pakai dan profesional sesuai kebutuhan pasar serta mampu bersaing dalam menghadapi MEA.
2. Mandiri dimaksudkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja siap pakai yang profesional sesuai kebutuhan pasar namun juga mampu berusaha sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki daya saing dalam berusaha, menciptakan peluang kerja dan dapat lebih memperluas kesempatan kerja.
3. Sejahtera Bersama dimaksudkan suasana yang memungkinkan jaminan dan keamanan berusaha, lingkungan kerja yang aman dan sehat serta pekerja /masyarakat yang sejahtera. Iklim tenaga kerja yang kondusif dapat pula menjamin ketenangan bekerja dan berusaha.

2. Pernyataan Misi .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai pejabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan .Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi .

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab.Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, Misi Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

▪ Misi pertama :

Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai Terminal poin guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata .

▪ Misi kedua :

Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industri guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional .

▪ Misi ketiga :

Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan SDE yang berkelanjutan ,berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan .

▪ Misi keempat :

Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

▪ Misi kelima :

Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektif dan bersih .

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 serta visi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan ,tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro

dan masukan dari pihak yang berkepentingan(stakeholders) ,ditetapkan Misi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu sebagai berikut :

Misi Pertama :

“ Mengurangi tingkat pengangguran, menjaga kondusivitas ketenagakerjaan dan memperluas kesempatan kerja”.

Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja kepada pencari kerja agar para pencari kerja memiliki keterampilan untuk mampu bersaing memasuki pasar kerja di era MEA dan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktifitas kerja. Menjaga kondusivitas dimaksudkan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan dan perlindungan hak-hak normatif / hak-hak dasar, memperoleh upah yang layak, perlindungan jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal tersebut dapat dicapai apabila peraturan perundangan dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Kondisi nyata dilapangan masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan ketenagakerjaan .Hal ini terlihat dengan adanya pengaduan tenaga kerja yang menuntut haknya. Untuk itu program yang mendukung peningkatan ketaatan terhadap peraturan ketenagakerjaan perlu terus dilaksanakan serta berkesinambungan antara lain :

- Pemeriksaan dan pengawasan khusus ,berkala dan rutin bagi norma-norma umum, K3 dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Sosialisasi peraturan perundangan.
- Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan Industrial.
- Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Tripartit.

Misi kedua :

“ Pembangunan kawasan transmigrasi yang produktif “ .

Melaksanakan pembangunan kawasan Transmigrasi baru serta meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran.

Misi ketiga :

“ Mengembangkan Program saran dan prasarana pelatihan sesuai kemampuan Tehnologi dan kebutuhan pasar “

Misi Keempat :

“ Meningkatkan koperasi yang berkualitas dan sehat “

- 1 Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat
- 2 Mengembangkan Produk unggulan daerah yang berdaya saing melalui Koperasi dan UMKM
- 3 Mewujudkan SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten
- 4 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
- 5 Mewujudkan entrepreneur di desa yang berdaya saing

4.2 Tujuan, Sasaran dan IKU Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor yang mempengaruhinya, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro : mewujudkan ekomomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi dan usaha mikro/ entrepreneur.

Perumusan tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.tanah Bumbu tahun 2016-2021 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
2. Meningkatnya Taraf Hidup Transmigran
3. Terwujudnya usaha mikro yang produktif
4. Meningkatnya kualitas koperasi

Tujuan, Indikator tujuan serta target tujuan jangka menengah seperti terlihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan serta Target Tujuan Jangka Menengah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir Periode Renstra (2020)
1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan	73.45%	78.50%
2.	Meningkatnya Taraf Hidup Transmigran	Meningkatnya Taraf Ekonomi dan Sosial Transmigran	0%	96%
3.	Terwujudnya usaha mikro yang produktif	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang produktif	-	26%
4.	Meningkatnya kualitas koperasi	Meningkatnya koperasi yang berdaya guna bagi anggota dan masyarakat	86.35%	87.29%

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan ,yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan, menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah sesuatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran - sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas angkatan kerja
2. Meningkatnya Implementasi peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan
3. Meningkatnya kemandirian transmigran
4. Meningkatnya pelaku usaha mikro yang kredibel
5. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi aktif

Indikatornya :

1. Persentase pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan
2. Persentase terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan
3. Persentase meningkatnya taraf ekonomi dan sosial warga transmigrasi
4. Persentase usaha mikro yang produktif
5. Persentase koperasi aktif

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021, seperti terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Tanah Bumbu
Tahun 2016 s/d 2021

N O.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	satuan	Kondisi kinerja pada awal periode	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi kinerja pada akhir periode (2020)	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)		(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	
1	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan	%	73.45%	74.50%	75.50%	76.50%	77.50%	78.50%	79.50%	78.50%
			Meningkatnya implementasi peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	Persentase terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan	%	60.00%	35.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	70%
2	Meningkatnya taraf hidup transmigran	Meningkatnya Taraf Ekonomi dan Sosial Transmigran	Meningkatnya kemandirian transmigran	Persentase meningkatnya taraf ekonomi dan sosial warga transmigrasi	%	0%	0%	24%	48%	72%	96%	100%	96%
3	Terwujudnya usaha mikro yang produktif	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang produktif	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang kredibel	jumlah pelaku usaha mikro yang kredible	%	-	9.7%	16.9%	20%	23%	26%	27%	26%
4	Meningkatnya kualitas koperasi	Meningkatnya koperasi yang berdaya guna bagi anggota dan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi aktif	Meningkatnya koperasi yang berdaya guna bagi anggota dan masyarakat	%	86.35%	86.54%	86.74%	86.93%	87.11%	87.29%	87.46%	87.29%

4.2.3 IKU (Indikator Kinerja Utama)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

IKU Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI /PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang dilatih ditambah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja x 100%.	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro	Kadis, Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kasi Pelatihan & Produktivitas dan Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
	Meningkatnya implementasi peraturan ketenagakerjaan di perusahaan	Persentase terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dibagi jumlah permasalahan yang ada x 100%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro	Kadis, Kabid HI & Jamsostek, Kasi HI & Syaker, Kasi Pengupahan & Jamsostek
Meningkatnya taraf hidup transmigran	Meningkatnya kemandirian transmigran	Persentase meningkatnya taraf ekonomi dan sosial warga transmigrasi	Jumlah transmigran yang meningkat taraf ekonomi dan sosialnya dibagi jumlah transmigran x 100%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro	Kadis, Kabid Trans, Kasi Kimtrans dan Kasi Pembinaan Trans.
Terwujudnya usaha mikro yang produktif	Meningkatnya pelaku usaha mikro yang kredibel	Persentase usaha mikro yang produktif	Jumlah usaha mikro yang produktif dibagi jumlah total usaha mikro x 100%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecamatan	Kadis, Kabid Kop&Usaha Mikro, Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
Meningkatnya kualitas koperasi	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi jumlah total koperasi x 100%	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro	Kadis, Kabid Kop&Usaha Mikro, Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu, TA 2016 – 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi Umum.

▪ Bidang Tenaga Kerja

- a. Pembangunan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.
- b. Pembinaan Kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- c. Pembinaan hubungan industrial serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

▪ Bidang Transmigrasi.

- a. Peningkatan mutu penyelenggaraan transmigrasi mulai dari input proses maupun output yang dihasilkan.
- b. Pengembangan pola usaha yang prospektif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Tanah Bumbu.
- c. Pengembangan SDM, kinerja dan pembinaan pegawai dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

▪ Bidang Penta Kerja.

- a. Menyelenggarakan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan Pemakai Kerja

- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan
- c. Menyelenggarakan pelatihan kerja kepada pencari kerja

- **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

- a. Menyelenggarakan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Mengembangkan Koperasi yang mandiri
- c. Menyelenggarakan Monitoring

2. Strategi Khusus.

- **Bidang Tenaga Kerja**

1. Perencanaan Tenaga Kerja

Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja.

Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkuat institusi pasar kerja meliputi :

- a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
- b. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
- c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
- d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.
- e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.

3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.

Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
- b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah.

4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional.

Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.
- c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.

5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :

Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut :

- a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik / perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.
- b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang *on line* dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.
- c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.

6. Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri.

Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.

7. Implementasi Hubungan Industrial dalam Iklim Keterbukaan

Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :

- a. Reformasi Serikat Pekerja.
- b. Pendidikan Perburuhan.
- c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.

8. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Strategi yang akan dilaksanakan :

- a. Perlindungan pengupahan.
- b. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri.
- c. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan.

▪ Bidang Transmigrasi.

1. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu penyiapan pemukiman transmigrasi baru melalui :
 - a. program pemukiman dan lingkungan ditujukan untuk dapat menunjang kepada berkembangnya UPT yang ada serta menemani UPT bermasalah yang diakibatkan oleh faktor fisik lingkungan.
 - b. Pembangunan permukiman transmigrasi baru diarahkan pada terwujudnya kondisi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang sehingga dapat merupakan basis dan titik tolok pengembangan pertanian dan perekonomian unit permukiman transmigrasi sampai kepada tingkat

perkembangan tertentu untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- c. Pengembangan permukiman berdasarkan SKP stelsel yang status pertanahannya sudah jelas serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam (lahan) dengan lebih berorientasi pada komunitas yang memiliki prospek dan layak usaha, melalui berbagai kegiatan investasi yang didukung oleh swasta.
- e. Penentuan pola usaha suatu permukiman ditetapkan menurut kondisi wilayah satuan pengembangan permukiman agar mempunyai skala produksi yang mempunyai kelayakan ekonomi.

2. Meningkatkan mutu proses pengerahan transmigrasi melalui :

- a. Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam pembangunan transmigrasi.
- b. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan seleksi untuk memperoleh calon transmigrasi yang bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi.
- c. Untuk dapat lebih mendorong dinamika masyarakat diupayakan adanya komposisi transmigrasi yang tidak miskin.
- d. Peningkatan penerangan dan penyuluhan pembangunan transmigrasi kearah sasaran prioritas penyerahan.

3. Mengintensifkan upaya peningkatan mutu pembinaan transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

- a. Pembinaan permukiman untuk dapat menggalang kemampuan transmigrasi agar mampu mandiri.
 - b. Membina permukiman transmigrasi secara terintegrasi dengan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan transmigrasi dengan sektor terkait.
4. Meningkatkan Manajemen Pendukung Pembangunan Transmigrasi.
- a. Dibidang Perencanaan, dengan tersusunnya sistem prosedur dan pedoman perencanaan dimaksud untuk tercapainya perencanaan dari bawah dan dari atas secara harmonis dan mampu mengasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dilapangan.
 - b. Dibidang pelaksanaan, diarahkan agar pelaksanaan (personil dan rekanan) berdedikasi tinggi, mampu, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program pembangunan transmigrasi yang menjadi tanggung jawab masing – masing, sehingga misi pembangunan transmigrasi dapat direalisasikan.
 - c. Dibidang penyediaan dana, akan dilaksanakan uji coba peningkatan standar harga (unit price). Kemudian tingkat produktifitasnya akan dibandingkan dengan hasil sebelumnya.
 - d. Di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (aparatur) diarahkan pada terwujudnya peningkatan kualitas aparatur yang mampu menumbuhkan gerakan pegawai yang efektif dan efisien sebagai pemacu keberhasilan misi transmigrasi.

5. Menjadikan pemukiman transmigrasi sebagai pengembangan Kota Terpadu Mandiri
 - a. Mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomi.
 - b. Memerlukan wilayah yang cukup luas minimal 18.000 Ha
 - c. Mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada
 - d. Masuk kedalam kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
 - e. Kawasan yang diusulkan tidak tumpang tindih.

• **Koperasi dan Usaha Mikro.**

- a. Pendelegasian pemberian izin usaha mikro dan kecil (IUMK) di kecamatan
- b. Memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil akses permodalan ke perbankan
- c. Memfasilitasi promosi produk unggulan KUMKM (m Koperasi usaha Mikro kecil menengah)
- d. Memfasilitasi koperasi memperoleh NIK (No Induk Koperasi) dari Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah RI serta menerapkan IT (Informasi Teknologi) dalam usaha kelembagaan koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi
- e. Melaksanakan Pembinaan pelatihan dan Moneva untuk pemberdayaan SDM KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Pelaksanaan pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri, Peningkatan Koperasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun kebijakan pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum

Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada bidang transmigrasi diprioritaskan untuk melaksanakan penyiapan kawasan transmigrasi baru pada kawasan pesisir dengan program transmigrasi nelayan ,rencana nya ada di lokasi Angsana yang penempatan awal di tahun 2016 sebanyak 75 KK dan ditahun 2017 sebanyak 25 KK .

2. Kebijakan Khusus

a. Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan Makro, Sektoral dan Regional yang Mendukung Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada kepentingan

pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.

- i. Penciptaan Lapangan Kerja Langsung yang Mewadahi Kepentingan Masyarakat Pekerja.

Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan.

Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan.

Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja.

- ii. Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja

Krisis ekonomi memberikan dampak negatif bagi perluasan kesempatan kerja pada sektor non pertanian namun keadaan ini tidak berlaku pada sektor pertanian, dimana terdapat kecenderungan yang semula tenaga kerja di sektor pertanian menurun jumlahnya, mengalami arus balik ketika krisis ekonomi berlangsung.

- iii. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas.

Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijakan tersebut diupayakan melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional.

iv. Pemberian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat syarat pekerja yang berkualitas.

b. Kebijakan Ketransmigrasian

- i. Mempersiapkan Kawasan Transmigrasi baru untuk mendukung Pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal .
- ii. Menunjang Sarana Aksebilitas Wilayah.

Dalam rangka pembangunan pusat – pusat pertumbuhan antara pusat wilayah pengembangan pembangunan I Banjarmasin dan pusat pengembangan II Tanah Bumbu / Kotabaru yakni terwujudnya jalan raya trans Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur melalui bagian Tenggara dan Timur Kalimantan Selatan.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SOPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu , dan disajikan dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI : WUJUDKAN MASYARAKAT TERAMPIL, MANDIRI</p> <p>MISI I : MENGURANGI TINGKAT PENGAGGURAN, MENJAGA KONDUSIVITAS KETENAGA KERJAAN DAN MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA (Penanggung Jawab : Bidang Penta Kerja dan Binawas)</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Ketenagakerjaan			
<p>Tujuan I</p> <p>Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja</p>	<p>1 Sasaran 1.1</p> <p>Meningkatkan Kualitas angkatan Kerja</p>	<p>1. Strategis 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi TK - Pengembangan jaringan kerjasama pelatihan antar sector - Peningkatan relevansi kualitas dan efisiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program fasilitas dan sarana infrastuktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan kelembagaan dan akreditasi 	<p>1 Kebijakan 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten dibidangnya
		<p>2. Strategis 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Produktifitas Tenaga kerja 	<p>2 Kebijakan1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan lapangan kerja langsung yang mawadahi kepentingan masyarakat pekerja
		<p>3, Strategis 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sistim informasi dan perencanaan tenaga kerja 	<p>3 Kebijakan 1.3</p> <p>Pembangunan sector yang membuka kesempatan kerja</p>
<p>Tujuan 2</p> <p>Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja</p>	<p>2. Sasaran 2.1</p> <p>Meningkatnya Implementasi peraturan ketenagakerjaan di Perusahaan</p>	<p>4.Strategis 1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja 	

		5. Strategis 1.5 - Perlindungan Tenaga Kerja - Jaminan sosial syarat kerja	5. Kebijakan 1.4 - Pemberian perlindungan dan kesejahteraan pekerja
		6. Strategis 1.6 - Pengawasan Hukum dan pengawasan ketenagakerjaan	6. Kebijakan 1.5 - Perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi TK
		7. Strategis 1.7 - Perlindungan Pengupahan TK	7. Kebijakan 1.6 - Penetapan UMK/UMSP
		8. Strategis 1.8 - Repormasi Serikat Pekerja - Pendidikan Perburuhan - Pemasyarakatan keadaan baru di Bidang HI	8. Pembinaan Hubungan Industri

MISI II : PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF (Penanggung Jawab Bidang Transmigrasi)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Bidang Transmigrasi			
Tujuan 3 Meningkatnya taraf hidup transmigran	3.Sasaran 3.1 Meningkatnya kemandirian transmigran	9. Strategi 3.1 Meningkatkan mutu penyiapan pemukiman transmigrasi baru	9. Kebijakan 3.1 Menunjang sarana aksesibilitas wilayah
		10. Strategis 3.2 Pengembangan dan pembinaan transmigrasi	10. Kebijakan 3.2 Pengembangan usaha masyarakat transmigrasi melalui Transmigrasi

MISI II : Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro			
Tujuan 4 Terwujudnya usaha mikro yang produktif dan Meningkatkan kualitas koperasi	Sasaran 4.1 Meningkatnya pelaku usaha mikro yang kredibel dan Meningkatkan pertumbuhan Koperasi aktif	Strategi 4.1 Memfasilitasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro	Kebijakan 4.1 Menciptakan iklim kelembagaan koperasi, usaha mikro yang kompetitif dan kondusif dengan peningkatan daya saing KUMKM dan peningkatan kemandirian KUMKM dalam Menghadapi MEA

BAB. V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

5.1 Rencana Program Tahun 2016 - 2021

Penyusunan program pembangunan akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Program Prioritas yaitu:

Bidang Ketenagakerjaan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Bidang Transmigrasi

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2. Program Transmigrasi Regional
3. Program Transmigrasi Lokal.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

1. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat
2. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berdaya saing melalui koperasi
Dan UMKM
3. Mewujudkan SDM pengelola koperasi dan UKM yang kompeten
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
5. Mewujudkan entrepreneur di desa yang berdaya saing

5.2 Rencana Kegiatan tahun 2016 – 2021

Rencana kegiatan pembangunan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tanah Bumbu untuk kurun waktu tahun 2016 – 2021 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.1 Program Prioritas : Bidang ketenaga kerjaan

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan meliputi :

- a. Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai
- b. Terciptanya wirausaha-wirausaha baru

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan meliputi :

1. Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan dengan cepat, tepat, adil dan murah
2. Meningkatkan kesadaran pengusaha terhadap Perkerjaan serta meningkatkan kesejahteraan
3. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
4. Terlaksananya Sosialisasi terhadap peraturan perUndangan-Undangan Ketenagakerjaan.
5. Terlaksananya kegiatan survey di pasar besar di Kab. Tanah Bumbu.

5.2.2 Program Pilihan Bidang Transmigrasi

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan meliputi :

- a. Identifikasi dan inventarisasi kawasan Transmigrasi dan eks transmigrasi
2. Program Transmigrasi Regional meliputi:
 - a. Penyuluhan Transmigrasi Regional.
 - b. Pelatihan Dasar Umum
 - c. Pelatihan Transmigrasi Regional Usaha Kecil Rumah Tangga.
 - d. Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
 - e. Pembentukan Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Sosial Budaya
3. Program Transmigrasi Lokal meliputi :
 - a. Pelatihan Transmigrasi Lokal

5.2.3 Program Pilihan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- 1 . Pengembangan potensi sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tupoksi sebagai institusi Pembina koperasi dan UMKM
2. Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip UMKM kepada Stakeholders
3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan penguasa teknologi
4. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen
5. Meningkatkan kemampuan akses terhadap sumber permodalan serta memperkuat struktur permodalan
6. Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan koperasi wanita
7. Peningkatan kapasitas dan volume usaha koperasi wanita

Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat disimak dalam daftar tabel, pada Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SOPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, akan dikemukakan indicator kinerja SOPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini .

Tabel 6.1

Indikator kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan	73.45%	74.50%	75.50%	76.50%	77.50%	78.50%	79.50%	78.50%
2	Persentase terselesaikannya permasalahan ketenagakerjaan	60.00%	35.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	70.00%
3	Persentase meningkatnya taraf ekonomi dan sosial warga transmigrasi	0%	0%	24%	48%	72%	96%	100%	96%
4	jumlah pelaku usaha mikro yang kredible	-	9.7%	16.9%	20%	23%	26%	27%	26%
5	Meningkatnya koperasi yang berdaya guna bagi anggota dan masyarakat	86.35%	86.54%	86.74%	86.93%	87.11%	87.29%	87.46%	87.29%

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program-program strategis disusun sebagai acuan dasar untuk dapat lebih menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro selama periode 2016-2021 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro ini ,memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan perencanaan ,koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan,memberikan arah,tujuan,sasaran,strategi,kebijakan ,program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi , Koperasi dan Usaha Mikro.

Renstra ini merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan rencana tahunan Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Tanah Bumbu selama periode lima tahun 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Disnakertranskopum dan didalam pelaksanaannya ,senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi ,sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kab.Tanah Bumbu.

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Tanah Bumbu,

Drs. SUHARTOYO,M.Pd
Pembina Tk.I/ IVb
NIP.19600527 198503 1 017